



RENCANA KERJA

— 2024 —



KATA PENGANTAR

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperlukan rangkaian rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan. Untuk melaksanakan rangkaian rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan baik jangka menengah (lima tahunan) ataupun jangka pendek (satu tahunan). Untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, sedangkan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat 2021-2026.

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif selama satu tahun ke depan, yang diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya di bidang pengawasan. Rancangan Rencana Kerja Inspektorat ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Demikian dengan telah disusunnya Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 ini dan dengan mengharap limpahan rahmat dari Yang Maha Kuasa, semoga kami mampu meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah serta memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 4 Juni 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. POEDJI WIDODO
Pembina Utama Muda
NIP. 19700425 199003 1 006

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 LANDASAN HUKUM	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4 SISTEMATIKA DAN TUJUAN	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2022.....	10
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2022 DAN APAIAN RENSTRA INSPEKTORAT	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	47
3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	56
BAB V PENUTUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (yang selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sendiri meliputi persiapan penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah dengan Perkada.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati Mojokerto tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD menjadi RKPD. Kemudian RKPD Tahun 2024 ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto, bahwa susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto terdiri atas Inspektur, Sekretaris yang membawahi Kepala Sub Bagian dan Kelompok /jabatan Fungsional, Inspektur Pembantu yang membawahi

Kelompok Jabatan Fungsional dan Inspektur Pembantu Khusus yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Mojokerto melakukan koordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten Mojokerto (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah), juga dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lain maupun Auditor Eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, dan Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto terpilih.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif “;

- 3) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 23) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
- 24) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto;
- 25) Keputusan Inspektur Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/2296/416-060/2022 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Tahun 2021 – 2026;
- 26) Keputusan Inspektur Kabupaten Mojokerto Nomor : 188/ /416-160/2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dimaksudkan agar perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan mampu menjadi pedoman dan tolak ukur Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah menentukan arah dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto di bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, agar supaya para pelaksana dan pemangku kepentingan pembangunan daerah mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah sehingga pembangunan di Kabupaten Mojokerto menjadi terarah dan terukur sesuai dengan perencanaan, serta mampu mencapai keberhasilan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto, serta susunan garis besar isi dokumen adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik berisi tentang latar belakang penyusunan rancangan rencana kerja, maksud dan tujuan, dan dasar alternatif penyusunan hubungan dokumen perencanaan lainnya, evaluasi kegiatan tahun lalu, pola pikir penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dengan mengacu pada APBD tahun berjalan pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat hal-hal yang terkait dengan rencana kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan pendanaannya, yaitu antara lain:

- a. Indikator kinerja
- b. Kelompok sasaran
- c. Lokasi kegiatan
- d. Kebutuhan dana indikatif; dan
- e. Sumber dana

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021-2026. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2022 dan Realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Inspektorat tahun 2022.

Total anggaran Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 APBD Murni sebesar Rp15.596.178.694,00. Terdiri dari :

- Belanja Operasi Rp14.796.564.504,00
- Belanja Modal Rp799.614.190,00

Realisasi sebesar Rp14.173.470.514,00 terdiri dari :

- Belanja Operasi Rp13.468.949.700,00
- Belanja Modal Rp704.520.814,00

Sehingga terdapat sisa anggaran Rp1.422.708.180,00 terdiri dari :

- Belanja Operasi Rp1.327.614.804,00
- Belanja Modal Rp95.093.376,00

Realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 sebesar Rp14.796.564.504,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 90,88%. dan capaian kinerja kegiatan sebesar 107,8% Inspektorat Kabupaten Mojokerto dapat dikategorikan berhasil dengan baik dalam pencapaian kinerja hingga Tahun 2022. Untuk rincian capaian kinerja kegiatan dan keuangan dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 2.1 (Tabel TC 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisasi 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Inspektorat	83,18 (A)	83,12(A)	83,14 (A)	85,1	102,36%	83,16 (A)		
		INOVASI	1	1	1	1	100%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	10 dokumen	4 dokumen	10 Dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen		
	Rincian :									
	Penyusunan Dokumen Renstra	Dokumen Renstra	5 dokumen	2 dokumen	5 Dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen		
	Penyusunan Dokumen Renja	Dokumen Renja yang tersusun tepat waktu	3 dokumen	1 dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen		
	Penyusunan Dokumen Renja Perubahan	Dokumen Renja Perubahan yang tersusun tepat waktu	2 dokumen	1 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	10 dokumen	4 dokumen	10 Dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen		
	Rincian :									
	Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja Triwulan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja	5 dokumen	2 dokumen	5 Dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen		
	Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja	5 dokumen	2 dokumen	5 Dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95,00%	92,70%	87%	90,88%	104,46%	94,00%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan	14 dokumen	1 Tahun	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen		
	Rincian :									
	Penyediaan Gaji ASN	Orang yang menerima gaji	14 dokumen	1 Tahun	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen		
	Penyediaan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	Orang yang menerima tunjangan dan TPP								

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisasi 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan	12 laporan	14 laporan	12 Laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
	Rincian :									
	<i>Penyusunan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan</i>	Dokumen LPJ	12 laporan	14 laporan	12 Laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	63	54	61	85,1	139,51%	62		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya	67 set	67 orang	67 set	67 orang	100%	67 set		
	Rincian :									
	<i>Biaya penyediaan pakaian dinas ASN</i>	Pegawai yang mendapatkan pakaian dinas	67 set	67 orang	67 set	67 orang	100%	67 set		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	24 unit	24 unit	24 Unit	24 unit	100%	24 unit		
	Rincian :									
	<i>Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor</i>	Jumlah unit komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	24 unit	24 unit	24 Unit	24 unit	100%	24 unit		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100%	25 unit		
	Rincian :									
	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	Paket penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100%	25 unit		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Makanan dan Minuman	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali	100%	60 kali		
	Rincian :									
	<i>Penyediaan makanan dan minuman rapat</i>	Paket penyediaan makanan dan minuman rapat	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali	100%	60 kali		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 kali	12 paket	12 kali	100%	12 paket		
	Rincian :									
	<i>Penyediaan barang cetakan</i>	Paket barang cetakan	6 paket	6 kali	6 paket	6 kali	100%	6 paket		
	<i>Penggandaan / foto copy</i>	Jumlah lembar foto copy dokumen	6 paket	6 kali	6 paket	6 kali	100%	6 paket		

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisasi 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan Bahan Bacaan Lainnya	65 Eksemplar	65 Eksemplar	65 Eksemplar	65 Eksemplar	100%	65 Eksemplar		
	Rincian : <i>penyediaan surat kabar dan bahan bacaan lainnya</i>	Jumlah surat kabar dan bahan bacaan lainnya	65 Eksemplar	65 Eksemplar	65 Eksemplar	65 Eksemplar	100%	65 Eksemplar		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang Disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map DLL	1 paket	1 paket	1 Paket	1 paket	100%	1 paket		
	Rincian : <i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	Paket penyediaan alat tulis kantor	1 paket	1 paket	1 Paket	1 paket	100%	1 paket		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali	100%	60 kali		
	Rincian : <i>Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu</i>	Laporan penyediaan makanan dan minuman untuk tamu	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali	100%	60 kali		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah	96 kali	96 kali	96 kali	96 kali	100%	96 kali		
	Rincian : <i>Biaya perjalanan dinas dalam daerah ASN Inspektorat</i>	Laporan perjalanan dinas dalam daerah	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	100%	48 kali		
	<i>Biaya perjalanan dinas luar daerah ASN Inspektorat</i>	Laporan perjalanan dinas luar daerah	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	100%	48 kali		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket pengiriman Jasa Surat Menyurat, perangko dan materai	500 paket	500 paket	65 paket	65 paket	100%	500 paket		
	Rincian : <i>Penyediaan paket pengiriman dokumen</i>	Laporan penyediaan paket pengiriman dokumen	500 paket	500 paket	65 paket	65 paket	100%	500 paket		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah terbayarnya tagihan biaya telepon, internet, dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
	Rincian : <i>Penyediaan jasa Komunikasi dan wifi</i>	Laporan penyediaan jasa komunikasi dan wifi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
	<i>Penyediaan jasa Listrik</i>	Laporan penyediaan jasa listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja selama 1 tahun	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	100%	12 laporan		
	Rincian :									

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisasi 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
	<i>Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Harian Lepas selama 1 Tahun (8 orang)</i>	Laporan Penyediaan Jasa Kerja Harian Lepas selama 1 tahun (8 orang)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	100%	12 laporan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	75 Unit	93%	94%	94%	100%	74 unit		
			5 Lokasi					5 Lokasi		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terbayarkan pajaknya	14 unit	14 unit	14 Unit	14 unit	100%	14 unit		
	Rincian :									
	<i>Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional</i>	Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanl	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit		
	<i>Biaya perizinan dan pajak kendaraan Dinas/Operasional</i>	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang telah dibayar PKB	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit		14 unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang diperbaiki Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	1 unit kompleks	1 unit kompleks	1 unit kompleks	1 unit kompleks	100%	1 unit kompleks		
	Rincian :									
	<i>Biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	Jumlah waktu pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	1 unit kompleks	1 unit kompleks	1 unit kompleks	1 unit kompleks	100%	1 unit kompleks		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik	60 unit	60 unit	60 Unit	60 unit	100%	60 unit		
	Rincian :									
	<i>Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan/peralatan kantor</i>	Jumlah unit pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan/peralatan kantor	60 unit	60 unit	60 Unit	60 unit	100%	60 unit		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	88%	87%	87%	89,50%	102,87%	87%		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	- Jumlah laporan pengawasan Internal	477 laporan	216 laporan	477 laporanlaporan	477 laporan		

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisasi 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
			86%	84%	85%%		85%		
			7 kali	7 kali	7 kalikali		7 kali		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja - Persentase penyelesaian TLHP	4 LHP	1 LHP	1 LHP	1 LHP	100%	4 LHP		
	Rincian :									
	Menilai kinerja pelaksanaan program meliputi 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) Audit (57 PD)	Jumlah Laporan Audit Kinerja	4 LHP	1 LHP	1 LHP	1 LHP	100%	4 LHP		
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan; dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	116 Laporan	116 Laporan	116 Laporan	116 Laporan	100%	116 Laporan		
	Rincian :									
	Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah pada 16 Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	16 laporan	16 laporan	16 laporan	16 laporan	100%	16 laporan		
	Pemeriksaan Dana BOS SD	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	100%	50 laporan		
	Pemeriksaan Dana BOS SMP	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	100%	50 laporan		
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu dan evaluasi - Jumlah pelaksanaan rakorwas	50 laporan	141 laporan	50 Laporan	50 Laporan	100%	50 laporan		
	Rincian :									
	Laporan Kinerja (Evaluasi SAKIP)	Evaluasi SAKIP OPD	25 laporan	70 laporan	25 laporan	25 laporan	100%	25 laporan		
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Reviu LPPD	25 laporan	71 laporan	25 laporan	25 laporan	100%	25 laporan		
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Reviu	8 LHR	8 LHR	8 LHR	8 LHR	100%	8 LHR		
	Rincian :									
	Reviu Laporan Keuangan (LKPD)	Jumlah Laporan Hasil Reviu	4 LHR	4 LHR	4 LHR	4 LHR	100%	4 LHR		
	Reviu Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran	2 LHR	2 LHR	2 LHR	2 LHR	100%	2 LHR		
	Reviu DAK Fisik	Jumlah Hasil Reviu DAK Fisik	2 LHR	2 LHR	2 LHR	2 LHR	100%	2 LHR		
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	299 LHP	299 LHP	49 LHP	49 LHP	100%	48 LHP		
	Rincian :									
	Pemeriksaan keuangan desa dan dana desa	Laporan Hasil Pengawasan Desa	299 LHP	299 LHP	49 LHP	49 LHP	100%	48 LHP		
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Jumlah	90%	90%	87%	89,50%	102,87%	90%		
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Rakorwas	7 kali	13 kali	7 Kali	7 kali	100%	7 kali		

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisasi 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
		Tingkat Provinsi dan Nasional RAKORWAS Tingkat Provinsi dan Nasional								
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	24 laporan	100%	20 laporan	20 Laporan	100%	20 laporan		
		Jumlah pelaksanaan penanganan kerugian daerah persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat	6 kali	12 Kali	4 kali	4 Kali	100%	4 kali		
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Gratifikasi yang disampaikan ke KPK dan Jumlah Pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	4 laporan	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 laporan		
	Rincian :									
	Unit Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Laporan Penanganan Gratifikasi yang disampaikan ke KPK	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan		
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan		
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	- Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu, Jumlah pelaksanaan penanganan kerugian daerah, Jumlah persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100%	20 Laporan		
	Rincian :									
	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (tematik atau insidental)	Jumlah Laporan yang diperiksa berdasarkan tujuan tertentu	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	10 laporan		
	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan Masyarakat	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	10 laporan		
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	3+	3	3	3	100%	3+		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	- Jumlah orang ,Jumlah dokumen dan Jumlah pelaksanaan kegiatan	4 dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	100%	100%	4 dokumen		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	- Jumlah dokumen Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja	4 dokumen	5 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 dokumen		

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisasi 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
		Pengawasan Tahunan - Jumlah dokumen penilaian Kapabilitas APIP								
	Rincian :									
	<i>Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3</i>	Dokumen penilaian mandiri Kapabilitas APIP	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 dokumen		
	<i>Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengawasan</i>	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan Pengawasan	2 dokumen	3 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 dokumen		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang mengikuti diklat	58 orang	58 orang	58orang	58orang	100%	58 orang		
		Jumlah pelaksanaan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional, P2UPD dan Auditor	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	4 kali		
		Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	4 kali		
	Rincian :									
	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas APIP selama 1 tahun</i>	Jumlah Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang mengikuti Diklat / Bimtek	58 orang	58 orang	58orang	58orang	100%	58 orang		
	<i>Tim Penilai Angka Kredit (PAK)</i>	Jumlah dokumen laporan penilaian angka kredit bagi Auditor dan Pengawas	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	4 kali		
	<i>Sekretariat Majelis Kode Etik</i>	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan operasional Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	4 kali		
	Pendampingan dan Asistensi	- Jumlah dokumen, Jumlah pelaksanaan kegiatan	301 dokumen	100%	301 Dokumen	301 Dokumen	100%	301 dokumen		
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	132 LHR	3 Kali	132 LHR	132 LHR	100%	132 LHR		
		- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	48 Laporan	18 kali	48 Laporan	48 Laporan		16 LHR		
		- Jumlah Laporan Monev Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	18 kali	4 Kali	18 Kali	18 Kali		18 kali		
		- Jumlah pelaksanaan Asistensi/pendampingan/ konsulting yang dilakukan	2 kali	3 Kali	2 Kali	2 Kali		2 kali		

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisasi 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
		- Jumlah pelaksanaan pemetaan resiko pada OPD		1 Kali						
				3 Kali						
				10 Jenis Dokumen 24 Kali						
	Rincian :									
	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah; RKPD P-RKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	132 LHR	3 Kali	132 LHR	132 LHR	100%	132 LHR		
	Reviu RENJA dan Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan RKA dan Perubahan									
	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	20 LHE	3 Bulan	20 LHE	20 LHE		20 LHE		
	Evaluasi perencanaan dan Penganggaran berbasis gender (Responsive gender) (mendukung kegiatan PUG)	Jumlah Laporan Monev Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	18 kali	4 Kali	18 Kali	18 Kali		18 kali		
	Asistensi/pendampingan/Konsulting dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Asistensi/Pendampingan/konsulting yang dilakukan	2 kali	3 Kali	2 Kali	2 Kali		2 kali		
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi, Jumlah OPD yang telah ditetapkan sebagai WBK/WBBM	48 OPD	12 OPD	48 OPD	48 OPD	100%	48 OPD		
	Rincian :									
	Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi	48 OPD	12 OPD	48 OPD	48 OPD	100%	48 OPD		
	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang telah ditetapkan sebagai WBK/WBBM		1 Kali						
	Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan Benturan Kepentingan		16 Kali						
	Penanganan Whistle Blowing System	tindak lanjut penanganan tindak lanjut pengaduan melalui WBS		14 Kali				12 OPD		

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisasi 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
	<i>Evaluasi Pelayanan Publik</i>	Penilaian Pelaksanaan unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik	12 OPD	13 Kali	12 OPD	12 OPD	100%			
	<i>Reviu LHKPN</i>	Reviu atas kelayakan penyajian Laporan LHKPN		2 Kali						
	<i>Verifikasi LHKASN</i>	Verifikasi Kelayakan penyajian Laporan LHKASN								
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Jumlah pelaksanaan sosialisasi anti korupsi, Jumlah laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi, Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan tindak lanjut SABER PUNGLI	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	100%	48 Kali		
	Rincian :									
	<i>Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	Jumlah Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	100%	48 Kali		
	<i>Operasi Sapu Bersih Pungutan Liar</i>	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Tindak lanjut SABER PUNGLI		8 Area intervensi						
	<i>Sosialisasi Anti Korupsi</i>	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi		3 Kali						
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pelaksanaan kegiatan survey penilaian integritas	12 Kali	1 Dokumen	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali		
	Rincian :									
	<i>Koordinasi Survei Penilaian Integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Survei Penilaian Integritas (SPI)	6 Kali	1 Dokumen	6 kali	6 kali	100%	6 kali		
	<i>Penilaian Zona Integritas</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian Pelaksanaan Zona Integritas	6 Kali	1 Dokumen	6 kali	6 kali	100%	6 kali		

a. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Inspektorat Kabupaten Mojokerto mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto di bidang pemerintahan yaitu peningkatan kualitas pengawasan yang profesional dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*). Pengawasan yang profesional memberi arti bahwa aparatur inspektorat dalam setiap pelaksanaan kegiatan/penugasannya, senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas profesi dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Inspektorat, yang keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik.

Terwujudnya *good governance* mengandung makna bahwa Inspektorat memiliki kewajiban moral sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk berada pada front line perwujudan *good governance* dengan bersikap pro aktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Seluruh program kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 2021-2026 maupun Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Inspektorat merupakan indikator yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pengawasan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat selama lima tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat. Tujuan utama (strategis) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu pencapaian tujuan mewujudkan Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif.

**Tabel 2.2 (Tabel TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten
Mojokerto**

No	Indikator	SPM / Standard Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			70.1	82	82,63	-		70,4	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			83,14 (A)	83,14 (A)	85,10 (A)	-	83,18 (A)	83,20 (A)	
3	Survey Penilaian Integritas (SPI)	71,94		70,1	70,2	74,0		70,4	70,5	
4	Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang Selesai Ditindaklanjuti		92%	87%	87%	89,5%	-	88%	88%	
5	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai			100 %	100%	100%	-	100%	100%	
6	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah			87%	94,00%	90,88%		96.00%	97,00%	
7	Level Kapabilitas (APIP)		Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 +	-	Level 3	Level 3	
8	Maturitas SPIP		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	Level 3,1	Level 3,3	
9	Indeks Profesionalitas ASN			61	80	85,10	-	63	64	

Berdasarkan tabel 2.2, Capaian rata-rata kinerja Inspektorat pada tahun 2022 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya serta menunjukkan kinerja yang baik pula. Peningkatan kinerja ini diimbangi dengan adanya peningkatan kualitas SDM pemeriksa yang difasilitasi adanya kegiatan diklat guna untuk mendukung terciptanya tata kelola penyelenggaraan

pemerintahan yang profesional.

1. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-1 terkait Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang tercapai 82,63% dari nilai target 70,1 mengingat adanya pencapaian yang cukup besar, maka Inspektorat meningkatkan target nilai Reformasi Birokrasi pada tahun-tahun berikutnya sebagai motivasi.
2. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja ke-2 terkait Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai sebesar 102,36%. Pencapaian predikat A (Memuaskan), merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.3
AKUMULASI PENILAIAN KOMPONEN AKIP

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30,00	25,87
Pengukuran Kinerja	30,00	27,18
Pelaporan Kinerja	15,00	12,65
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,40
Jumlah	100,00	85,10

3. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-3 terkait Nilai Survey Penilaian Integritas tercapai sebesar 105,56%, namun hasil Nilai Survey Penilaian Integritas tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,7 dari tahun 2021 dengan hasil nilai sebesar 74,7 menjadi 74,00 di tahun 2022.
4. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-4 terkait dengan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tercapai sebesar 89,5% tercapai 102,87% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan program yang dilaksanakan oleh Inspektorat dalam hal penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal telah dioptimalkan, dalam bentuk peningkatan kualitas komunikasi dan koordinasi dengan obrik pemeriksaan serta perangkat daerah terkait.
5. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja ke-5 terkait Persentase Indikator Program Perangkat Daerah tercapai sebesar 100%. Program Inspektorat Kabupaten Mojokerto terdiri dari :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
6. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja ke-6 terkait Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tercapai sebesar 104,46%, dari target 87% dengan realisasi sebesar 90,88%.
7. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-4 terkait Level Kapabilitas APIP tercapai sebesar 100% dari target. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri dari enam elemen yaitu :

TABEL 2.4
HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI KAPABILITAS APIP
INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2	Praktik Profesional	3	0,540
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

8. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin-8 terkait Nilai Maturitas SPIP tercapai sebesar 105,33% dari target level 3 dengan perolehan nilai 3,1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2022 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.
9. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja ke-9 terkait Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) tercapai sebesar 139,51%, dari target 61 dengan realisasi sebesar 85,10.

Tabel 2.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	SPM / Standard Nasional	Target tIKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022(thn n-1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13
1	Nilai Survey Penilaian Integritas	72,4		70,0	70,1	74,7	74,0	70,2	70,3	
2	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat			70,0	70,1	68,45	82,63	70,2	70,3	

3	Nilai Maturitas SPIP			3	3	2,925	3,1	3,1	3,3	
---	----------------------	--	--	---	---	-------	-----	-----	-----	--

Berdasarkan Tabel 2.3 tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Mojokerto, bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Indikator pertama yaitu Nilai Survey Penilaian Integritas capaian nilai pada tahun 2021 adalah 74,7 sedangkan pada tahun 2022 realisasi yang dicapai adalah 74,0 yang bisa diartikan bahwa capaian pada tahun 2022 menurun dari tahun 2021;
2. Pada indicator kedua yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat pencapaian nilai yang didapat Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah 82,63 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 nilai yang dicapai mengalami kenaikan;
3. Sedangkan pada indicator ketiga yaitu Nilai Maturitas SPIP mengalami kenaikan diangka 3,1 dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang berada di nilai 2,925.

Dari keseluruhan indicator kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Mojokerto rata-rata tercapai lebih dari 100% dengan kategori sangat baik.

Pembahasan SPI (Survey Penilaian Integritas) yang menjadi indicator Tujuan Inspektorat adalah sebagai berikut, pada RENSTRA Inspektorat Tahun 2021-2026 BAB V (Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Mojokerto) yang efektif akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa :

- a. Tujuan Inspektorat adalah : Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif;
- b. Dengan Indikator Tujuan : Nilai Survey Penilaian Integritas Indikator;
- c. Target Nilai SPI pada tahun 2022 adalah 70,1

Dari pernyataan diatas, dapat kami simpulkan bahwa salah satu tugas berat Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah nilai SPI.

Pada tahun 2022 SPI dilakukan dengan cara elektronik dan tatap muka (CAPI) di 98 kementrian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dilakukan oleh KPK. Hasil keseluruahn peserta SPI 2021 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada diangka 71,94 sementara Kabupaten Mojokerto mendapatkan skor sebesar 74.

Survei Penilaian Integritas (SPI) dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah (K/L/PD). Hasil SPI dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. Berdasarkan rekomendasi tersebut, K/L/PD diharapkan mampu

menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi pencegahan korupsi di instansi masing-masing dan menjadikannya sebagai gerakan perubahan. Secara berkelanjutan, hasil SPI di tahun berikutnya akan menjadi alat ukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari perubahan tersebut Hasil Survei Penilaian Integritas 2021 menghasilkan penilaian untuk berbagai dimensi integritas. Berikut adalah rangkuman temuan kondisi integritas di Kabupaten Mojokerto :

1. Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di instansi ini, namun dampaknya terhadap pembentukan perilaku antikorupsi masih dapat ditingkatkan lebih optimal. Sosialisasi antikorupsi hendaknya dirancang agar efektif menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/ suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
2. Upaya pencegahan korupsi di instansi ini diharapkan dapat dioptimalkan lagi agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi perlu meningkatkan sistem antikorupsi melalui penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Termasuk meyakinkan pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.
3. Risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) masih ada meski dalam skala rendah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.
4. Kalangan eksternal meyakini bahwa indikator transparansi dan keadilan layanan sudah cukup baik di instansi ini, yaitu mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas.
5. Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala rendah. Meskipun rendah, risiko ini bisa muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.
6. Hasil SPI menunjukkan bahwa menurut kalangan pegawai indikator transparansi memperlihatkan angka yang baik, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
7. Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini menghadapi beberapa risiko yang rendah dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan,

almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Meskipun demikian risiko ini tetap harus diantisipasi agar tidak meningkat.

8. Pengelolaan anggaran telah cukup baik pada instansi ini. Meskipun demikian, risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran perlu diantisipasi di masa mendatang karena biasanya terjadi pada saat penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
9. Pengelolaan pengadaan barang/jasa dinilai sudah cukup baik di instansi ini. Meskipun demikian, munculnya risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa perlu diantisipasi karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
10. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/pemerasan ketika berhubungan dengan instansi selama 12 bulan terakhir hampir tidak ditemui. Meskipun demikian, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.

b. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

Salah satu upaya Pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang paling utama adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur sebagai implementasi dari tuntutan aspirasi reformasi, agar aparatur negara mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih berwibawa, dan berintegritas guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Mojokerto, Inspektorat Kabupaten Mojokerto menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di bawah ini :

- 1) Penguatan birokrasi yang bersih;

- 2) Penguatan integritas ASN;
- 3) Penguatan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah;
- 4) Peningkatan pemahaman ASN terkait pengelolaan keuangan daerah;
- 5) Peningkatan kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan;
- 6) Peningkatan sistem pengawasan yang efektif; dan
- 7) Peningkatan Kapabilitas APIP yang berintegritas.

c. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Berdasarkan rancangan penyusunan RKPD Tahun 2024 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto selaku APIP, maka kebutuhan dana yang diusulkan untuk pendanaan program dan kegiatan diharapkan dapat mengcover kelancaran dalam mencapai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

**Tabel 2.6 (Tabel T-C 31 pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN MOJOKERTO	NILAI HASIL EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT	83,16 (A)	15.241.305.745	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN MOJOKERTO	NILAI HASIL SAKIP INSPEKTORAT	83,16 (A)	15.654.765.742
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	100%	42.800.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	100%	35.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen perencanaan	10 dokumen	21.400.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	21.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah laporan evaluasi kinerja	10 dokumen	21.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	14.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94%	13.647.947.003	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	93%	13.633.547.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah laporan	14 dokumen	13.626.547.003	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ Bulan	13.612.547.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah laporan	12 laporan	21.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	7.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	IP ASN Perangkat Daerah	62	58.850.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	IP ASN Perangkat Daerah	Nilai 62	34.000.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	7.000.000
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13 Dokumen	7.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya	67 set	58.850.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	34.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	754.350.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	711.900.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	24 unit	10.700.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kelengkapan	1 Paket	10.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	25 unit	214.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, LED, Printer dll.	25 Paket	200.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	60 kali	42.800.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	42.800.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	80.250.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	77.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah surat kabar dan Bahan Bacaan Lainnya	65 Eksemplar	10.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	65 Dokumen	10.700.000
	Penyediaan Bahan/ Material	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah ATK yang Disediakan	1 paket	160.500.000	Penyediaan Bahan/ Material	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Paket/ Bahan Material yang Disediakan	1 Paket	150.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan makann dan minuman	60 kali	21.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	21.400.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah	96 kali	214.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	200.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	282.608.742	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	281.978.742
								Daerah Sesuai Kebutuhan		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Paket pengiriman Jasa Surat Menyurat, perangko dan materai	500 paket	9.630.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 bulan	129.256.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	129.256.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja selama 1 tahun	12 laporan	143.722.742	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	143.722.742
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	74 unit 6 lokasi	454.750.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	94%	353.340.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan yang terbayarkan pajaknya	14 unit	12.840.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16 Unit	173.340.000
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan yang terpelihara	14 unit	160.500.000					
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah gedung yang diperbaiki Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 lokasi 4 Lokasi	249.310.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik	60 unit	32.100.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	60 unit	30.000.000
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah laporan pengawasan Internal Persentase penyelesaian TLHP Jumlah pelaksanaan rakorwas	477 laporan 85% 7 kali	2.246.710.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	420 Laporan	1.605.000.000
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja	4 LHP	160.500.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	150.000.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	116 laporan	481.500.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	52 Laporan	350.000.000
	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil reviu dan evaluasi	50 laporan	179.225.000	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	49 Laporan	130.000.000
	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan hasil Reviu	8 LHR	219.350.000	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	195.000.000
								Pemerintah Daerah		
	Pengawasan Desa	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	299 LHP	674.100.000	Pengawasan Desa	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	299 Laporan	300.000.000
	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen	2 dokumen	50.000.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6 Kesepakatan	50.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Penyelesaian Tindak	91%	482.035.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	2 Dokumen	430.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Lanjut Rekomendasi BPK			Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
			Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, Rakorwas Tingkat Provinsi dan Nasional RAKORWAS Tingkat Provinsi dan Nasional	7 kali						
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	24 laporan	679.450.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	46 Laporan	325.000.000
			Jumlah pelaksanaan penanganan kerugian daerah	6 kali						
			Jumlah persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat	85%						
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik	4 kali	251.450.000	Penangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	14 Laporan	150.000.000
			Jumlah Laporan Penanganan Gratifikasi yang disampaikan ke KPK	4 laporan						
			Jumlah Pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	6 kali						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan	132 LHR 20 LHE 48 Laporan	1.242.056.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	48 Perangkat Daerah	630.000.000
			Anggaran Tahunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Jumlah Laporan Monev Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Jumlah pelaksanaan Asistensi/pendampingan/konsulting yang dilakukan	18 kali 2 kali				Urusan Pemerintah Daerah		
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah OPD yang telah ditetapkan sebagai WBK/WBBM	48 OPD 12 OPD	374.500.000	Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48 Perangkat Daerah	280.000.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah pelaksanaan sosialisasi anti korupsi Jumlah laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	48 kali 41 laporan	1.019.175.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan	100 Kegiatan	665.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pemberantasan Korupsi		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan tindak lanjut SABER PUNGLI	48 kali		Pemberantasan Korupsi		dan Pemberantasan Korupsi			
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah pelaksanaan fasilitasi survey penilaian integritas	12 kali	158.895.000	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48 Perangkat Daerah	120.000.000	
TOTAL				21.810.066.745		TOTAL				19.794.765.742	

d. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan; kemudian disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaa Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini; dan terakhir disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi/ MCP KPK Tahun 2022 pada Area Pengawasan APIP terkait alokasi anggaran Inspektorat, maka bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

- i. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada Lampiran Huruf E. Hal Khusus Lainnya, nomor 8 huruf c point 2.b disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota yang alokasi belanja daerah diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), maka alokasi anggaran untuk Inspektorat paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- ii. Pada APBD Tahun Anggaran 2023 alokasi anggaran Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebesar Rp Rp15.596.178.694,00 atau sebesar 0,54% dari total Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Mojokerto yakni sebesar Rp. 2.449.758.308.645,00,

Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada point 1 diprioritaskan untuk penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, diantaranya :

1. Kegiatan pengawasan, yaitu :
 - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi reuiu RPJMD, reuiu RKPD, reuiu RKA- SKPD, reuiu LKPD, reuiu laporan kinerja, reuiu penyerapan

- anggaran, reuiu penyerapan pengadaan barang dan jasa, reuiu realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK-Fisik, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBK, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
- b. Pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan, tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - c. Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap bupati/wali kota untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten/Kota dan evaluasi pelayanan publik; dan
 - d. Penegakan integritas, meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*.
2. Kegiatan non pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
 3. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain- lain.

Usulan-usulan Program dan Kegiatan tersebut kami jabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7 (Tabel TC-32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Inspektorat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (2024)	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 Tahun 2016, Inspektorat Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

TABEL 3.1
PERMASALAHAN PELAKSANAAN PEMBINAAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	Penguatan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang bersih melalui pengawasan yang belum efektif.	1.1	Tata kelola birokrasi belum optimal	1.1.1	Kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja belum optimal.
				1.1.2	Kepatuhan pengelola keuangan, kepegawaian dan barang terhadap ketentuan belum optimal.
		1.2	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan belum optimal	1.2.1	Penguatan integritas ASN yang belum optimal
				1.2.2	Penguatan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah belum optimal.
				1.2.3	Sistem pengawasan yang belum efektif
		1.3	Kapabilitas APIP yang belum komitmen dan berintegritas	1.3.1	Penyusunan perencanaan pengawasan yang belum berbasis resiko
				1.3.2	Komitmen pemimpin dalam melaksanakan pengawasan berbasis resiko

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Mojokerto di masa mendatang.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2021 – 2026 melalui Rencana Strategis tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui program kegiatan setiap tahunnya guna untuk mencapai

visi selama 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja di masing-masing tujuan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Mojokerto merumuskan tujuan dan sasaran yang terkait dengan capaian Misi Kepala Daerah yang terkait :

A. Tujuan

Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif

B. Sasaran

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Inspektorat;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP.

CASCADING KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 - 2026

TUJUAN			
Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel			
INDIKATOR TUJUAN			
Nilai Survey Penilaian Integritas			
SASARAN			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP		
INDIKATOR SASARAN			
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai maturitas SPIP		
PROGRAM			
Program Penjangk Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
INDIKATOR PROGRAM			
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Level Kapabilitas APIP

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana kerja yang lebih operasional untuk kurun satu tahun yaitu 2024, meliputi program, kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat

Kabupaten Mojokerto. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang.

Rincian program dan kegiatan/sub kegiatan selama tahun 2024 sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tercantum dalam tabel TC. 33 :

Tabel 3.2 (T-C. 33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							
6	1	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah							
6	1 0 0 1 0	Inspektorat Kabupaten							
6	1 0 0 1 0	Inspektorat Kabupaten							
6	1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP 83,18 (A)	16,308,197,147	APBD		Nilai SAKIP 83,20 (A)	14,244,210,977
		INOVASI		1					
6	1 1 2 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	100%	45,796,000	APBD		100%	40,000,000
6	1 1 2 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	10 Dokumen	22.898.000	APBD		10 dokumen	20,000,000
6	1 1 2 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	10 Dokumen	22.898.000	APBD		10 dokumen	20,000,000
6	1 1 2 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	94%	14.603.303.293	APBD		96%	12,755,090,657
6	1 1 2 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kab. Mojokerto	58 Orang/ Bulan	14.576.905.293	APBD		14 dokumen	12,735,090,657

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Kab. Mojokerto	12 Dokumen	12.000.000	APBD		12 laporan	20,000,000
6	1	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Kab. Mojokerto	2 Laporan	7.398.000	APBD		2 Laporan	-
6	1	1	2	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat Kab. Mojokerto	13 Dokumen	7.000.000	APBD		13 Dokumen	-
6	1	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Nilai 62	62.969.500	APBD		64	55,000,000
6	1	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Kab. Mojokerto	1 Paket	62.969.500	APBD		67 Paket	55,000,000
6	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Inspektorat Kab. Mojokerto	100%	807.154.500	APBD		100%	705,000,000
6	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kelengkapan	Inspektorat Kab. Mojokerto	1 Paket	11.449.000	APBD		24 Unit	10,000,000
6	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, LED, Printer dll.	Inspektorat Kab. Mojokerto	25 Paket	228.980.000	APBD		25 Paket	200,000,000
6	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kab. Mojokerto	48 Paket	45.796.000	APBD		60 kali	40,000,000
6	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Inspektorat Kab.	1 Paket	85.867.500	APBD		12 Paket	75,000,000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan	Mojokerto						
6	1	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Inspektorat Kab. Mojokerto	65 Dokumen	11.449.000	APBD		65 Eksemplar	10,000,000
6	1	1	2	6	7	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket/ Bahan Material yang Disediakan	Inspektorat Kab. Mojokerto	1 Paket	171.735.000	APBD		1 Paket	150,000,000
6	1	1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Kab. Mojokerto	12 Laporan	22.898.0000	APBD		60 kali	20,000,000
6	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kab. Mojokerto	24 Laporan	228.980.000	APBD		96 kali	200,000,000
6	1	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Inspektorat Kab. Mojokerto	100%		APBD		-	-
6	1	1	2	7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Inspektorat Kab. Mojokerto	9 Unit		APBD		-	-
6	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	Inspektorat Kab. Mojokerto	100%	302.391.354	APBD		100%	264,120,320
6	1	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kab. Mojokerto	12 Laporan	10.304.100	APBD		500 Paket	9,000,000
6	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat Kab. Mojokerto	24 Laporan	138.303.920	APBD		12 Bulan	120,800,000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kab. Mojokerto	12 Laporan	153.783.334	APBD		12 Laporan	134,320,320
6	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Inspektorat Kab. Mojokerto	94%	486.582.500	APBD		95%	425,000,000
6	1	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Inspektorat Kab. Mojokerto	16 Unit	185.473.800	APBD		16 Unit	12,000,000
6	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terbayarkan pajaknya	Inspektorat Kab. Mojokerto	14 Unit	171.735.000	APBD		14 unit	150,000,000
6	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Inspektorat Kab. Mojokerto	1 Unit	266.761.700	APBD		2 Lokasi 4 Lokasi	233,000,000
6	1	1	2	9	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Inspektorat Kab. Mojokerto	60 unit	34.347.000	APBD		60 unit	30,000,000
6	1	2				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Kabupaten Mojokerto	87%	3.038.979.700	APBD		88%	
6	1	2	2	1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	Inspektorat Kab. Mojokerto	420 Laporan	2.403.979.700	APBD		477 laporan 86% 7 kali	2,103,000,000
6	1	2	2	1	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	4 Laporan	171.735.000	APBD		4 LHP	150,000,000
6	1	2	2	1	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	52 Laporan	515.205.000	APBD		116 laporan	450,000,000
6	1	2	2	1	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kab.	49 Laporan	191.770.750	APBD		50 laporan	167,500,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemerintah Daerah	Mojokerto						
6	1 2 2 1 4	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kab. Mojokerto	8 Laporan	234.704.500	APBD		8 LHR	205,000,000
6	1 2 2 1 5	Pengawasan Desa	Inspektorat Kab. Mojokerto	299 Laporan	721.287.000	APBD		299 Laporan	630,000,000
6	1 2 2 1 6	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Kab. Mojokerto	6 Kesepakatan	53.500.000	APBD		2 dokumen	50,000,000
6	1 2 2 1 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kab. Mojokerto	2 Dokumen	515.777.450	APBD		90% 7 kali	450,500,000
6	1 2 2 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kab. Mojokerto	46 Laporan	635.000.000	APBD		46 Laporan	635,000,000
6	1 2 2 2 1	Penangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	14 Laporan	235.000.000	APBD		4 laporan 6 kali	235,000,000
6	1 2 2 2 2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kab. Mojokerto	32 Laporan	400.000.000	APBD		20 laporan 85% 4 kali 4 kali	400,000,000
6	1 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kabupaten Mojokerto	Level 3	3.487.300.000	APBD		Level 3	
6	1 3 2 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kab. Mojokerto	20 Rekomendasi	875.500.000	APBD		4 dokumen 10 kali	792,500,000
6	1 3 2 1 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Kab. Mojokerto	10 Rekomendasi	217.500.000	APBD		2 dokumen 2 dokumen 2 kali	217,500,000
6	1 3 2 1 2	Perumusan Kebijakan Teknis di	Inspektorat Kab.	10	658.000.000	APBD		58 orang	575,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
	Bidang Fasilitasi Pengawasan	Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Mojokerto	Rekomendasi				4 kali								
6	1	3	2	2				Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Kab. Mojokerto	48 Perangkat Daerah	2.611.800.000	APBD		301 dokumen 128 kali	2,611,800,000
6	1	3	2	2	1			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	48 Perangkat Daerah	1.160.800.000	APBD		132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	1,160,800,000
6	1	3	2	2	2			Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kab. Mojokerto	48 Perangkat Daerah	350.000.000	APBD		48 OPD 12 OPD	350,000,000
6	1	3	2	2	3			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kab. Mojokerto	100 Kegiatan	952.500.000	APBD		48 kali 41 laporan 48 kali	952,500,000
6	1	3	2	2	4			Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kab. Mojokerto	48 Perangkat Daerah	148.500.000	APBD		12 kali	148,500,000
JUMLAH TOTAL							22.834.476.847				20,386,510,977					

Sumber : Perencanaan, 2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Mojokerto, maka perlu disusun Rencana Kerja dan Pendanaannya. Adapun rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebesar Rp. 22.834.476.847,- (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) sebagaimana tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Nama OPD : Inspektorat

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	L		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	83,16	Kabupaten Mojokerto	16,308,197,147	-	0	-	0	-
						INOVASI	1	Inspektorat Kab. Mojokerto						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	L	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target		100%	Inspektorat Kab. Mojokerto	45,796,000	-	0	-	0	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan		3 Dokumen	Inspektorat Kab. Mojokerto	22.898.000					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Dokumen	Inspektorat Kab. Mojokerto	22.898.000					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	L	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		93%	Inspektorat Kab. Mojokerto	14.603.303.293	-	0	-	0	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		58 Orang/ Bulan	Inspektorat Kab. Mojokerto	14.576.905.293					
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	Inspektorat Kab. Mojokerto	12.000.000					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	7.398.000					
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		13 Dokumen	Inspektorat Kab. Mojokerto	7.000.000					

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	L	IP ASN Perangkat Daerah		62	Inspektorat Kab. Mojokerto	62.969.500	-	0	-	0	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	Inspektorat Kab. Mojokerto	62.969.500					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	L	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		100%	Inspektorat Kab. Mojokerto	807.154.500	-	0	-	0	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kelengkapan		1 Paket	Inspektorat Kab. Mojokerto	11.449.000					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, LED, Printer dll.		25 Paket	Inspektorat Kab. Mojokerto	228.980.000					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		48 Paket	Inspektorat Kab. Mojokerto	45.796.000					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	Inspektorat Kab. Mojokerto	85.867.500					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		65 Dokumen	Inspektorat Kab. Mojokerto	11.449.000					
		Penyediaan Bahan/ Material			Jumlah Paket/ Bahan Material yang Disediakan		1 Paket	Inspektorat Kab. Mojokerto	171.735.000					
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	228.980.000					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		24 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	228.980.000					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	L	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		100%	Inspektorat Kab. Mojokerto		-	0	-	0	-

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		9 Unit	Inspektorat Kab. Mojokerto						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	L	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		100%	Inspektorat Kab. Mojokerto	302.391.354	-	0	-	0	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	10.304.100					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	138.303.920					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	153.783.334					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	L	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		94%	Inspektorat Kab. Mojokerto	486.582.500	-	0	-	0	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		16 Unit	Inspektorat Kab. Mojokerto	185.473.800					
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Inspektorat Kab. Mojokerto	266.761.700					
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		60 unit	Inspektorat Kab. Mojokerto	34.347.000					
2		Program Penyelenggaraan Pengawasan	-	L		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	87%	Kabupaten Mojokerto	3.038.979.700	-	0	-	0	-
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	L	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal		420 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	2.403.979.700	-	0	-	0	-
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		4 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	171.735.000					

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		52 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	515.205.000					
		Reviu Laporan Kinerja			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		49 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	191.770.750					
		Reviu Laporan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		8 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	234.704.500					
		Pengawasan Desa			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		299 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	721.287.000					
		Kerjasama Pengawasan Internal			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		6 Kesepakatan	Inspektorat Kab. Mojokerto	53.500.000					
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		2 Dokumen	Inspektorat Kab. Mojokerto	515.777.450					
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	L	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		46 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	635.000.000	-	0	-	0	-
		Penangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani		14 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	235.000.000					
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		32 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	400.000.000					
3		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	-	L		Level Kapabilitas APIP	3	Kabupaten Mojokerto	3.487.300.000	-	0	-	0	-
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	L	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		20 Rekomendasi	Inspektorat Kab. Mojokerto	875.500.000	-	0	-	0	-
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		10 Rekomendasi	Inspektorat Kab. Mojokerto	217.500.000					
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		10 Rekomendasi	Inspektorat Kab. Mojokerto	658.000.000					

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
		Pendampingan dan Asistensi	-	L	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi		48 Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	2.611.800.000	-	0	-	0	-
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		48 Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	1.160.800.000					
		Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		48 Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	350.000.000					
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		100 Kegiatan	Inspektorat Kab. Mojokerto	952.500.000					
		Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		48 Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	148.500.000					

Sumber : Perencanaan, 2023

BAB V

PENUTUP

Pada Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2022 telah disajikan capaian kinerja sasaran program maupun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2022. Berbagai capaian sasaran program dan kegiatan tersebut tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan. Pada tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Mojokerto secara umum telah dapat merealisasikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan capaian kinerja sebesar 107,8%. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan capaian sebesar 96,48% atau naik sebesar 11,32%. Jika dibandingkan target capaian kinerja di tahun akhir RPJMD (tahun 2026), maka tingkat kemajuan capaian kinerja Inspektorat tahun 2022 sebesar 102,61%. Hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam tercapainya kinerja Inspektorat pada tahun 2022 antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan program kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Kerja sama yang baik antara tim pelaksana pada Inspektorat.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang perlu langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut :

1. Memaksimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya, sehingga mampu melaksanakan semua tugas mandatoris yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
2. Melengkapi sarana dan prasarana dengan ditunjang oleh Sistem Informasi yang terintegrasi untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan pengolahan data pengawasan di Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

Hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya. Dengan capaian yang telah melampaui target, maka perlu dilakukan evaluasi atas target kinerja pada tahun berikutnya, sehingga tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pada dokumen perencanaan. Hasil Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 memuat visi, misi, arah kebijakan serta indikator rencana program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten

Mojokerto ini merupakan rancangan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan- bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Mojokerto, sedangkan landasan operasional berdasarkan dokumen perencanaan tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah Rencana Kerja OPD untuk menyusun *action plan* yaitu Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKAP OPD), dalam rangka hal tersebut Inspektorat Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Semoga Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelolapemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

Mojokerto, 4 Juni 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. POEDJI WIDODO
Pembina Utama Muda
NIP. 19700425 199003 1 006